

## **Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu**

**\* Fika Dwi Nazira <sup>1</sup>, Rizky Setiawan <sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*\*Corresponding Author : [fikadwinazira@student.uir.com](mailto:fikadwinazira@student.uir.com)*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pengelolaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Kelesa telah mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan, serta lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada belum optimalnya realisasi pembangunan infrastruktur desa. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa agar pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, dan Pembangunan**

### **Abstract**

This research was conducted in Kelesa Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency, which aims to determine how Village Funds are managed in infrastructure development in Kelesa Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency, and to identify factors that hinder the management process. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation from various informants consisting of the Village Head, Village Secretary, Village Consultative Body, and local community leaders. The results of the study indicate that the management of Village Funds in Kelesa Village has followed the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability, but there are still obstacles such as lack of socialization to the community, lack of community involvement in the planning process, and weak supervision and transparency in fund management. These obstacles have an impact on the less than optimal realization of village infrastructure development. Therefore, it is necessary to increase the capacity of village officials and strengthen community participation in the process of managing Village Funds so that village development can run more effectively, efficiently, and on target.

**Keywords: : Management, Village Funds, and Development**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan khusus kepada desa sebagai wilayah otonom, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, serta pelaksanaan pembangunan desa. Dalam regulasi ini juga dijelaskan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu lembaga pemerintahan desa yang beranggotakan perwakilan masyarakat desa yang dipilih secara demokratis. Musyawarah Desa menjadi wadah diskusi yang melibatkan BPD, pemerintah desa, serta masyarakat dalam membahas berbagai persoalan strategis.

Pengelolaan dana desa berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas desa, sehingga keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dana menjadi hal yang krusial. Partisipasi ini diharapkan dapat mendorong kepala desa bersama perangkatnya dalam mewujudkan program-program prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi warga. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah desa dan masyarakat menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari dalam maupun luar desa, termasuk kondisi sosial masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut perlu ditangani secara tepat agar pengelolaan dana desa bisa berjalan lebih efisien dan maksimal.

Secara umum, pendapatan desa bersumber dari berbagai pos, seperti pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan, alokasi dana dari APBN, bantuan dari pemerintah daerah, serta hibah dari pihak ketiga. Pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan fiskalnya guna mempercepat pembangunan desa. Selain itu, desa juga dapat menghasilkan pendapatan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan pasar desa, destinasi wisata, maupun dari sumber daya alam lain yang tidak diperjualbelikan.

Desa Kelesa, yang berada di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan wilayah kecamatan lain dan sedang dalam tahap pembangunan. Pemerintah desa terus berupaya membangun agar Desa Kelesa tidak tertinggal, salah satunya melalui pemanfaatan dana APBD Desa.

Walaupun setiap tahunnya desa menerima dana desa, namun pelaksanaan program pembangunan belum sepenuhnya berjalan optimal dan belum memberikan dampak kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan transparansi dalam pelaksanaan program dan penggunaan dana agar masyarakat Desa Kelesa dapat memahami serta mengawasi jalannya pembangunan di desa mereka.

**Tabel 1.**  
**Rencana Pembangunan Infrastruktur di Desa Kelesa**

| No | Tahun | Program Pembangunan Desa | Anggaran       | Realisasi         |
|----|-------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 1  | 2024  | Box culvert              |                |                   |
|    |       | RT 09                    | Rp. 44.689.500 | Terealisasi       |
|    |       | RT 05                    | -              | Belum terealisasi |
|    |       | RT 08                    | -              | Belum terealisasi |
|    |       | RT 01                    | -              | Belum terealisasi |
|    |       | RT 02                    | -              | Belum terealisasi |
|    |       | RT 03                    | -              | Belum terealisasi |
|    |       | RT 04                    | -              | Belum terealisasi |
|    |       | RT 06                    | -              | Belum terealisasi |
|    |       | RT 07                    | -              | Belum terealisasi |
|    |       | Timbunan box culvert     |                |                   |

| No | Tahun | Program Pembangunan Desa          | Anggaran      | Realisasi         |
|----|-------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
|    |       | RT 09                             | Rp.14.916.500 | Terealisasi       |
|    |       | RT 05                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 08                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 01                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 02                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 03                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 04                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 06                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 07                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | Pembangunan jalan/semnisasi jalan |               |                   |
|    |       | RT 09                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 05                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 08                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 01                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 02                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 03                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 04                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 06                             | -             | Belum terealisasi |
|    |       | RT 07                             | -             | Belum terealisasi |

Sumber: Dana Desa Kelesa

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, RT 09 memperoleh penambahan box culvert dengan jumlah anggaran Rp. 44.689.500 beserta timbunan box culvert dengan jumlah anggaran Rp.14.916.500 sedangkan RT lainnya belum memperoleh penambahan box culvert dan timbunan box culvert. Dan tidak terealisasinya Pembangunan jalan/semnisasi jalan di semua RT.

**Tabel 2**  
**Ketidaktepatan Sasaran Pembangunan Infrastruktur di Desa Kelesa Tahun 2024**

| No | Jenis Pembangunan                | Lokasi/RT                             | Sasaran                             |
|----|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Box Culvert/Timbunan Box Culvert | RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 | Sudah tepat sasaran pada RT 09 saja |
| 2. | Pembangunan Jalan/Semenisasi     | RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 | Tidak tepat sasaran                 |

Sumber: Dana Desa Kelesa

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi program belum sepenuhnya tepat sasaran. Pembangunan box culvert hanya terealisasi di RT 09, sementara RT lainnya tidak mendapatkan alokasi pembangunan sebagaimana direncanakan. Selain itu, program pembangunan jalan atau semenisasi yang merupakan kebutuhan mendasar seluruh warga di setiap RT juga belum terealisasi sama sekali. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pemerataan dan prioritas yang tepat dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga berdampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam desa.

Terdapat beberapa fenomena yang di dapatkan oleh penulis untuk mendukung penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tidak terealisasinya secara keseluruhan pembangunan infrastruktur desa di desa kelesa kecamatan seberida kabupaten Indragiri hulu.
- b. Penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan administrasi yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa. Lokasi penelitian adalah Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan Dana Desa, antara lain:

1. Kepala Desa,
2. Sekretaris Desa,
3. Anggota BPD,
4. Ketua RT,
5. Kaur Keuangan.

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara mendalam, untuk menggali persepsi, pengalaman, dan evaluasi para pemangku kepentingan.
2. Observasi langsung, terhadap proses administrasi dan kondisi fisik infrastruktur desa.
3. Dokumentasi, terhadap dokumen perencanaan desa, laporan realisasi anggaran, dan data APBDes.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perencanaan

Proses perencanaan dimulai dengan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) yang menjadi wadah partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat untuk merumuskan kebutuhan prioritas pembangunan. Musdes ini kemudian menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan diturunkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahun. Dokumen RKPDDes selanjutnya menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam kasus Desa Kelesa, tahapan ini telah dilakukan secara administratif, namun ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat masih bersifat formalitas dan belum substantif. Banyak warga yang tidak mengetahui substansi program yang direncanakan, bahkan beberapa RT mengaku tidak diundang dalam forum Musdes.

### 2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui dan tercantum dalam APBDes. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan fisik, seperti box culvert dan semenisasi jalan, tidak berjalan sesuai rencana. Berdasarkan data tahun 2024, hanya RT 09 yang memperoleh pembangunan infrastruktur berupa box culvert, sementara delapan RT lainnya tidak mendapatkan realisasi sebagaimana tercantum dalam dokumen

perencanaan. Hal ini menandakan adanya ketimpangan distribusi pembangunan yang dapat memicu ketidakpuasan masyarakat.

### 3. Penatausahaan

Proses penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa dengan menggunakan sistem manual berbasis pembukuan dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank. Penelusuran terhadap dokumen menunjukkan adanya keterlambatan dalam pencatatan transaksi, serta ketidaksesuaian antara realisasi fisik di lapangan dan data administrasi yang tersedia. Minimnya supervisi dan kurangnya pemahaman Kaur Keuangan terhadap sistem akuntansi desa menjadi tantangan utama dalam tahap ini.

### 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara semesteran serta laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran. Laporan ini disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan kerap hanya bersifat administratif dan kurang mencerminkan kondisi riil di lapangan. Masyarakat juga tidak pernah menerima informasi secara terbuka mengenai isi laporan tersebut. Tidak adanya papan informasi anggaran di lokasi proyek pembangunan turut memperkuat temuan mengenai lemahnya transparansi.

Dalam implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Kelesa, peneliti mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang berkontribusi terhadap tidak optimalnya pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Faktor-faktor tersebut meliputi:

#### a. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Salah satu temuan signifikan dalam penelitian ini adalah minimnya upaya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat mengenai rencana dan pelaksanaan program Dana Desa. Sebagian besar warga tidak mengetahui jumlah Dana Desa yang diterima, alokasi penggunaannya, maupun indikator keberhasilan program. Musyawarah desa yang semestinya menjadi ruang partisipasi masyarakat cenderung dilakukan secara terbatas dengan melibatkan tokoh tertentu saja. Akibatnya, masyarakat merasa kurang memiliki program pembangunan, yang berdampak pada rendahnya rasa kepemilikan dan partisipasi dalam kegiatan desa.

#### b. Lemahnya Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola keuangan desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi terkait APBDes dan realisasi kegiatan tidak dipublikasikan secara terbuka. Tidak ditemukan media informasi seperti papan transparansi atau dokumen yang dapat diakses masyarakat umum. Kurangnya akses informasi ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki dasar untuk melakukan pengawasan, sehingga ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan menjadi lebih terbuka. Selain itu, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan masih bersifat administratif dan tidak didukung oleh pelaporan berbasis hasil (output dan outcome).

#### c. Ketidaktepatan Sasaran Pembangunan

Dana Desa seharusnya dialokasikan berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat yang dirumuskan secara partisipatif dalam Musyawarah Desa. Namun dalam praktiknya, ditemukan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Kelesa tidak merata dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Sebagai contoh, program pembangunan jalan dan semenisasi yang seharusnya menyasar seluruh RT, hanya

teralisasi sebagian. Hal ini menimbulkan ketimpangan antarwilayah dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.

**d. Terbatasnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa**

Pelaksanaan program Dana Desa sangat bergantung pada kualitas aparatur desa. Namun, banyak perangkat desa di Desa Kelesa belum memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam hal perencanaan anggaran, manajemen proyek, serta pelaporan keuangan. Ketidadaan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan dari pemerintah kabupaten menjadi kendala serius. Aparatur desa kerap bekerja berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan regulasi dan prinsip manajemen yang benar.

**e. Kurangnya Pengawasan dari BPD dan Masyarakat**

Fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman BPD terhadap fungsi dan kewenangannya, serta tidak adanya sistem monitoring yang sistematis. Masyarakat sebagai unsur kontrol sosial pun belum diberdayakan dalam mengawasi program pembangunan desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Kelesa telah mengikuti struktur formal dan prosedural, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa. Pelibatan masyarakat yang rendah, ketidaktransparanan, serta lemahnya pengawasan menjadi tantangan utama. Penguatan kapasitas aparatur desa dan partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan Dana Desa ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Handoko, T.H. (2012). *Manajemen*. BPFE Yogyakarta.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Buku Saku Dana Desa*.
- Sujarweni, V.W. (2016). *Manajemen Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Erlangga.